

**LAPORAN  
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
SEMESTER II TAHUN 2025**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Tujuan dan Manfaat .....	4
1.3 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM .....	6
1.5 Penentuan Jumlah Responden .....	6
BAB II ANALISIS DATA SKM .....	8
2.1 Analisis Responden .....	8
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan .....	9
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut .....	11
2.4 Tren Nilai SKM .....	12
BAB III HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA .....	13
BAB IV KESIMPULAN .....	17
LAMPIRAN .....	18
1. Kuesioner .....	18
2. Dokumentasi terkait Pelaksanaan SKM (Foto Pelaksanaan SKM) .....	20

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Metode Pengumpulan Data .....	5
Tabel 1.2 Waktu Pelaksanaan SKM .....	6
Tabel 1.3 Penentuan Jumlah Responden .....	7
Tabel 2.1 Analisis Responden .....	8
Tabel 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan .....	9
Tabel 2.3 Rencana Tindak Lanjut .....	11
Tabel 3.1 Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya).....	13
Tabel 3.2 Realisasi Rencana Tindak Lanjut .....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

### **1.2 Tujuan dan Manfaat**

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan public secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;

4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

### 1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dilaksanakan menggunakan metode yang disesuaikan pada karakteristik setiap layanan untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi metode secara online dan offline demi menjangkau seluruh segmen pengguna layanan secara efektif. Rincian metode survei yang digunakan untuk setiap jenis layanan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Metode Pengumpulan Data**

No	Jenis Layanan	Metode Survei
1	Pelayanan Konsultasi dan Pengajuan Rekomendasi Site Plan Perumahan	online & offline
2	Pelayanan Pendaftaran Calon Penghuni Rusunawa	online & offline
3	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) dan atau Pembangunan Baru (PB) Rumah	online & offline
4	Proposal Berkas Pencairan dan atau Berkas LPJ BanSos PK-RTLH dan atau PB Rumah	online & offline
5	Pengajuan Penanganan Permukiman Kumuh	online & offline
6	Penyerahan PSU	online & offline
7	Perizinan Magang atau PKL	online & offline

Instrumen survei yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang mengacu pada 9 (sembilan) unsur pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu:

1. Persyaratan: Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk alur pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian: Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenisnya.

4. Biaya/Tarif: Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Kompetensi Pelaksana: Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana: Sikap dan tindakan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjutnya.
9. Sarana dan Prasarana: Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

#### 1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dilakukan secara periodik sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. Periode pengumpulan data untuk laporan ini dilaksanakan selama Semester II Tahun 2025 (2025). Keseluruhan proses, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan, memerlukan waktu selama 4 bulan. Rincian tahapan dan alokasi waktu kegiatan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.2 Waktu Pelaksanaan SKM**

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Persiapan	01 Jul 2025 - 30 Nov 2025	153
2	Pengumpulan Data	01 Jul 2025 - 30 Nov 2025	153
3	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	01 Nov 2025 - 30 Nov 2025	30
4	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	01 Nov 2025 - 30 Nov 2025	30

#### 1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden untuk setiap jenis layanan didasarkan pada populasi masing-masing. Untuk memastikan sampel yang diambil bersifat representatif, jumlah minimum responden ditetapkan menggunakan metode yang mengacu pada Tabel Krejcie dan Morgan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap layanan memiliki jumlah responden yang memadai secara statistik untuk menghasilkan data yang akurat. Rincian

populasi dan target sampel minimum untuk setiap layanan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.3 Penentuan Jumlah Responden**

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Jumlah Populasi</b>	<b>Sampel Minimum</b>
1	Pelayanan Konsultasi dan Pengajuan Rekomendasi Site Plan Perumahan	50	44
2	Pelayanan Pendaftaran Calon Penghuni Rusunawa	20	19
3	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) dan atau Pembangunan Baru (PB) Rumah	50	44
4	Proposal Berkas Pencairan dan atau Berkas LPJ BanSos PK-RTLH dan atau PB Rumah	50	44
5	Pengajuan Penanganan Permukiman Kumuh	45	40
6	Penyerahan PSU	50	44
7	Perizinan Magang atau PKL	10	10
<b>Total</b>		<b>275</b>	<b>245</b>

## BAB II ANALISIS DATA SKM

### 2.1 Analisis Responden

Analisis terhadap karakteristik responden bertujuan untuk memahami latar belakang dan profil dari para pengguna layanan. Pada periode survei ini, data berhasil dikumpulkan dari total 65 responden. Profil demografis responden, yang mencakup aspek-aspek seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

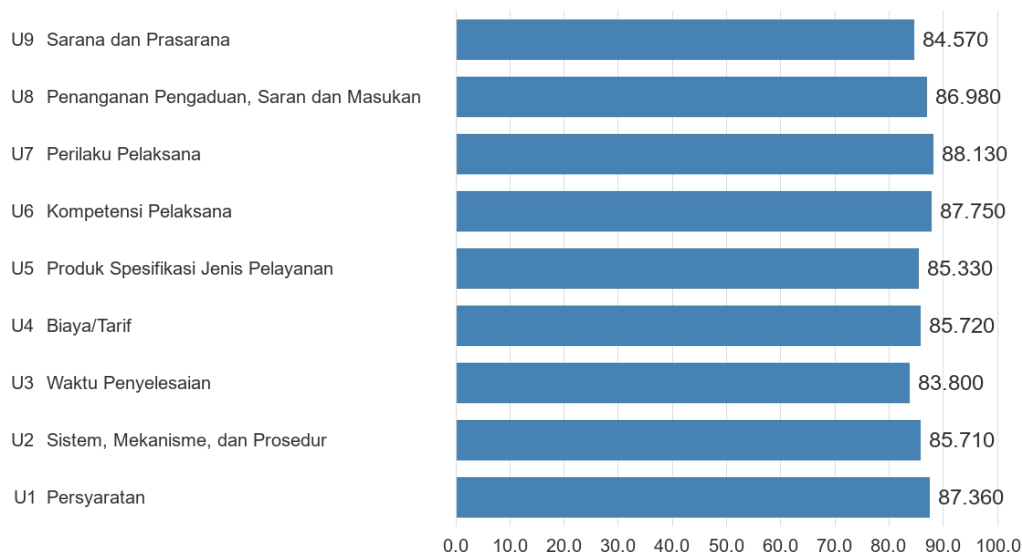
**Tabel 2.1 Analisis Responden**

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	53	81.54%
		Perempuan	14	21.54%
2.	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%
		SD/Sederajat	0	0%
		SMP/Sederajat	2	3.08%
		SMA/Sederajat	25	38.46%
		D1/D2/D3	3	4.62%
		D4/S1	36	55.38%
		S2	1	1.54%
		S3	0	0%
3.	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI	0	0%
		POLRI	0	0%
		Swasta	26	40%
		Wirausaha	4	6.15%
		Ibu Rumah Tangga	1	1.54%
		Pelajar/Mahasiswa	1	1.54%
		Petani/Nelayan	1	1.54%
		Pekerja Lepas/Freelance	1	1.54%
		Pensiunan	0	0%
		Lainnya	32	49.23%
	Perangkat Desa	1	1.54%	
4.	Kategori Pengguna Layanan	Non Disabilitas	67	103.08%
		Disabilitas	0	0%
5.	Kategori Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%



	dan atau PB Rumah											
5	Pengajuan Penanganan Permukiman Kumuh	2	87.50	75.00	75.00	75.00	75.00	87.50	87.50	87.50	75.00	80.56
6	Penyerahan PSU	20	82.50	85.00	83.75	87.50	86.25	86.25	86.25	86.25	85.00	85.42
7	Perizinan Magang atau PKL	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
Rerata IKM Per Unsur			87.36	85.71	83.80	85.72	85.33	87.75	88.13	86.98	84.57	86.15
IKM Unit Layanan			<b>86.15</b>									
Mutu Unit Layanan			<b>Baik (B)</b>									

Grafik Nilai IKM Agregat per Unsur



Gambar 2.1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

### 2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis data SKM, dapat diidentifikasi beberapa unsur pelayanan yang menjadi prioritas utama untuk perbaikan. Secara kuantitatif, unsur-unsur dengan nilai terendah adalah: Waktu Penyelesaian, Sarana dan Prasarana, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. Temuan ini sejalan dengan analisis kualitatif dari kritik dan saran yang diterima, dimana beberapa tema utama yang sering disorot oleh masyarakat antara lain: Tidak ada saran/kritik yang dipilih untuk ditampilkan dalam laporan. Atas dasar temuan tersebut, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai IKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama perbaikan adalah pada unsur-unsur yang telah diidentifikasi sebagai prioritas. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut adalah rencana tindak lanjut yang telah disusun untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang:

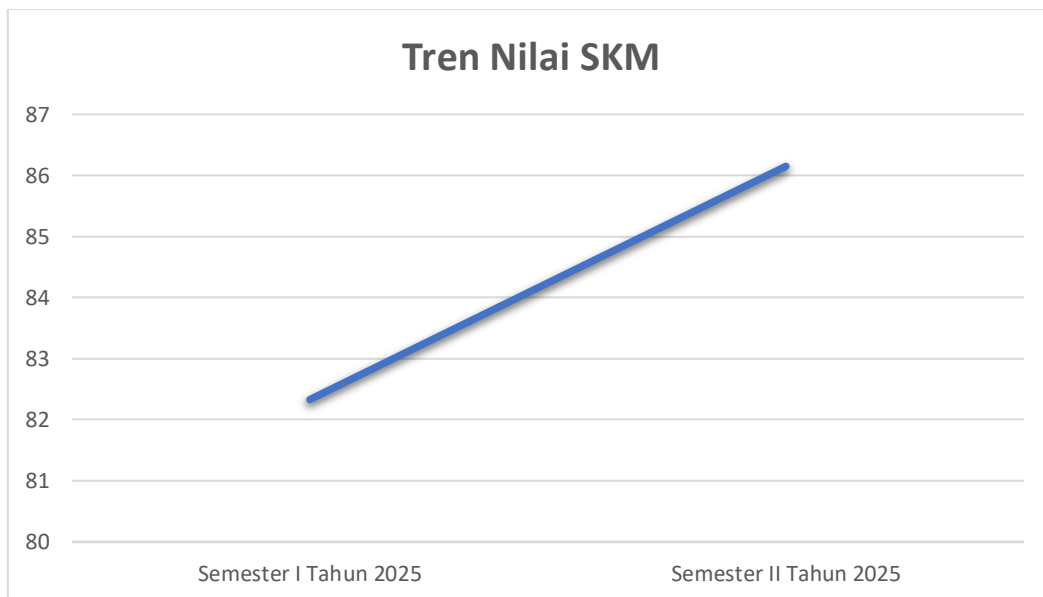
Tabel 2.3 Rencana Tindak Lanjut

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Waktu Penyelesaian	Memperbaiki jangka waktu penyelesaian	Bulan Januari 2026	Bidang
2	Sarana Prasarana	Memperbaiki Sarana Prasarana	Bulan Januari 2026	Sekretaris

3	Produk Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	Menyelesaikan dan memperbaiki produk dan jenis pelayanan	Juni 2026	Bidang - bidang
---	--	--	-----------	-----------------

## 2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman selama beberapa periode terakhir dapat dilihat melalui grafik di bawah ini. Grafik ini menggabungkan data historis yang diarsipkan dengan data yang dihasilkan oleh sistem untuk memberikan gambaran yang komprehensif.



**Gambar 2.2. Grafik Tren Nilai SKM**

Berdasarkan grafik di atas, tren nilai SKM menunjukkan tren penurunan yang perlu menjadi perhatian. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman telah menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan yang berkelanjutan.

**BAB III**  
**HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA**


Tidak ada data laporan dari periode sebelumnya untuk ditampilkan karena ini adalah periode pelaporan pertama dalam sistem.

**Tabel 3.1 Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)**

<b>No</b>	<b>Unsur</b>	<b>IKM</b>
1	Persyaratan	3,24
2	Sistem, Mekanisme, dan Produksi	3,36
3	Waktu Penyelesaian	3,00
4	Biaya/Tarif	3,44
5	Produk, Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	3,20
6	Komptensi Pelaksanaan	3,20
7	Perilaku Pelaksana	3,40
8	Penanganan pengaduan saran dan masukan	3,04
9	Sarana dan Prasarana	3,64

**Tabel 3.2 Realisasi Rencana Tindak Lanjut**

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Dilakukan Sosialisasi terhadap Pelayanan	Sudah	Telah dilakukan sosialisasi terhadap pengguna layanan. Kendala yang dihadapi : ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki hp android, dan sudah sepuh.	 <p data-bbox="1522 922 2063 1007"> <small>GPS Map Camera</small>                      Kecamatan Grogol, Jawa Tengah, Indonesia                      9°59'33xS, 110°48'33xE, Mirahagen, Pandeyan, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552, Indonesia, Kecamatan Grogol, Jawa Tengah 57552, Indonesia                      Lat -7.632237° Long 110.837417°                      06/08/2025 09:28 AM GMT +07:00                 </p>

2	Meningkatkan layanan umum kantor dan simplifikasi proses bisnis	Sudah	Menerima layanan di kantor maupun jemput bola ke desa-desa	 <p>The top photograph shows three women in a meeting room. Two women are seated on a blue sofa, and one woman is standing and looking at a document. There are laptops and papers on a table in front of them. The bottom photograph shows an elderly man standing in front of a building. A GPS overlay is visible in the bottom right corner of the image, providing location information for Kecamatan Bulu, Jawa Tengah, Indonesia.</p>
---	---	-------	--	--

3	Perbaikan sistem layanan	Sudah	Memberikan pelayanan dengan menyediakan aplikasi	 
---	--------------------------	-------	--	---



## BAB IV KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Juli s.d. November 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 65 orang mengisi SKM pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dari beberapa layanan yang ada, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) dan atau Pembangunan Baru (PB) Rumah menjadi layanan dengan pengguna terbanyak, terlihat dari jumlah responden yang mengisi survei yaitu 33 orang.
2. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, secara umum mencerminkan tingkat kualitas Baik (B) dengan nilai SKM 86.15. Meskipun demikian, nilai SKM menunjukkan pola yang stabil.
3. Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu Penyelesaian, Sarana dan Prasarana, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
4. Tidak ada data Rencana Tindak Lanjut dari periode sebelumnya yang dapat dianalisis.

Sukoharjo, 11 Desember 2025

**Kepala Dinas Perumahan dan  
Kawasan Permukiman**



Lanjat Budi Wahono, S.T  
Pembina Tk. I

NIP. 196911281997031007

## LAMPIRAN

### 1. Kuesioner

#### KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT LAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

<b>A. IDENTITAS RESPONDEN</b>			
<b>Jenis Layanan:</b>			
Tanggal Menerima Layanan:			
Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan			
Pendidikan: <input type="checkbox"/> Tidak Sekolah <input type="checkbox"/> SD/Sederajat <input type="checkbox"/> SMP/Sederajat <input type="checkbox"/> SMA/Sederajat <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> D4/S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3		Usia: <input type="checkbox"/> < 17 tahun <input type="checkbox"/> 17-25 tahun <input type="checkbox"/> 26-34 tahun <input type="checkbox"/> 35-44 tahun <input type="checkbox"/> 45-54 tahun <input type="checkbox"/> 55-65 tahun <input type="checkbox"/> >65 tahun	
Pekerjaan: <input type="checkbox"/> ASN <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> POLRI	<input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Wirausaha <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa <input type="checkbox"/> Petani/Nelayan <input type="checkbox"/> Pekerja Lepas/Freelance	<input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Lainnya _____
Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			
Jika ya, jenis disabilitas apa yang Anda miliki/dampingi? (Jika tidak, lewati)			
<input type="checkbox"/> Disabilitas Fisik <input type="checkbox"/> Disabilitas Intelektual		<input type="checkbox"/> Disabilitas Mental <input type="checkbox"/> Disabilitas Sensorik	

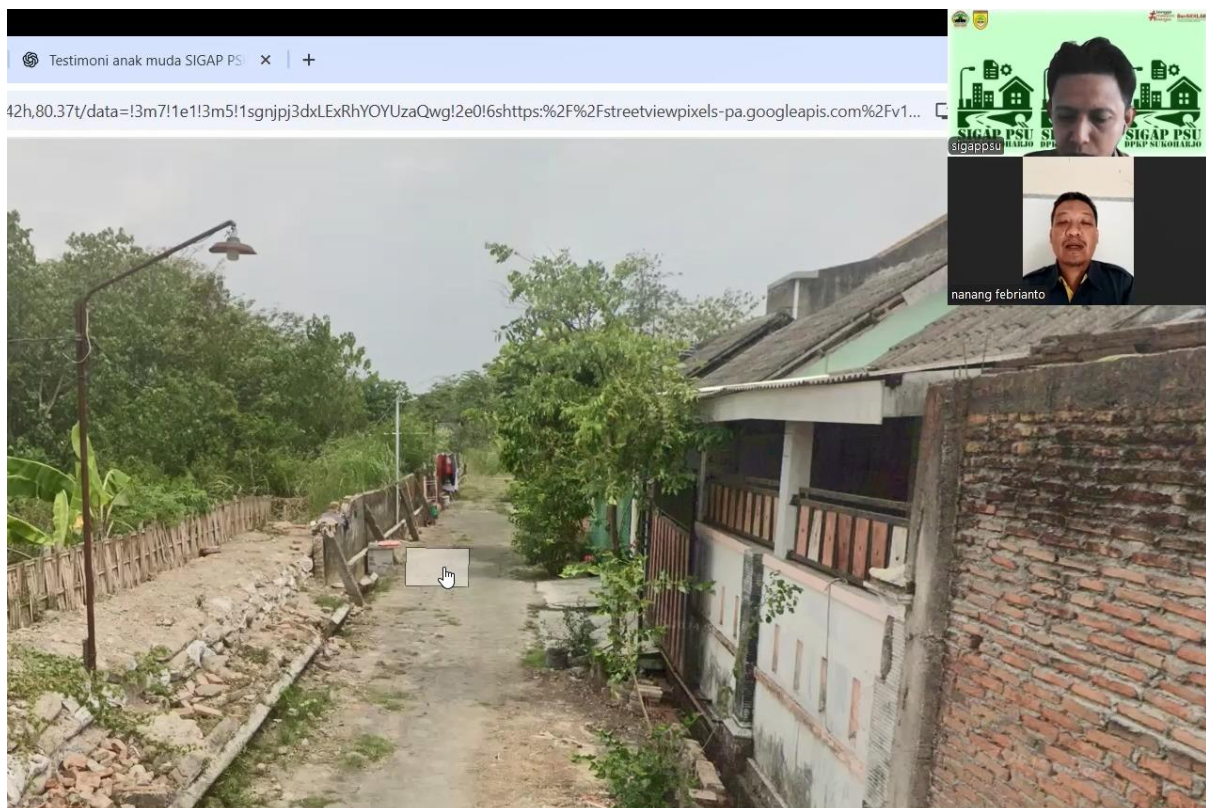
## A. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

<p>1. Persyaratan layanan diinformasikan dengan jelas dan mudah dipahami</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>	<p>6. Petugas merespon kebutuhan dengan cepat</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>2. Prosedur/Alur layanan mudah dipahami dan dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>	<p>7. Petugas melayani saya dengan ramah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>3. Layanan yang diberikan sudah tepat waktu</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>	<p>8. Layanan konsultasi dan pengaduan mudah diakses</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>4. Rincian biaya/tarif layanan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>	<p>9. Sarana prasarana nyaman dan mudah digunakan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>5. Kualitas produk layanan yang diterima memuaskan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>	

Kritik dan Saran:

## 2. Dokumentasi terkait Pelaksanaan SKM (Foto Pelaksanaan SKM)

### a) Pelayanan SIGAP PSU



Sigap PSU (spreadsheet) - Goo... bu dyah griya mutiara demakar... Pantun pembuka rapat Zoom

FuB8IMk/view

tu bertanya : Ketika PSU sudah  
n kepada Pemkab, apakah benar nanti  
asilitas akan dibawah pengawasan

vaktu kunjungan, ada warga yang  
lapat jika nanti ada  
gunan(perbaikan) maka bisa jadi  
ikan digusur. Saya mau minta  
ian Pak/Bu agar salah satu warga ini  
iam akan aturan Pemkab dalam  
han PSU. Sebab salah satu warga ini  
menghasut beberapa warga dengan  
at dia yang tidak berdasar. Sehingga

MONITORING DAN EVALUASI  
SIGAP PSU  
DPAK SUKOHARJO

dyahpu

SURANTO

PSU DPAK Sukoharjo

Menata ulang semangat: Cara me... Join from Zoom Workplace app - 2 X SIGAP PSU

rms/d/e/1FAIpQLSdu0qflsCG9OxvlnPZW9HdLZRUBYbrvr225-ptEJPYdVlVcg/viewform

## SIGAP PSU

Sistem Informasi dan Komunikasi *via Google Form* dalam  
Pengelolaan *Perbaikan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)* Perumahan dan  
Permukiman di Kabupaten Sukoharjo

sigappsu@gmail.com [Ganti akun](#)

Nama, alamat email, dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat  
Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini

1. Digunakan oleh **pengembang** untuk melaporkan kebutuhan perbaikan PSU perumahan pada saat **proses penyerahan PSU** perumahan.
2. Digunakan oleh **warga perumahan** untuk **melaporkan kondisi**, mengajukan **permohonan perbaikan** dan mengajukan pemberitahuan **penggunaan lahan PSU perumahan**.
3. Digunakan oleh **kelurahan** untuk menjaring **usulan pemeliharaan jalan** sebagai bahan **perencanaan program tahunan** pemerintah daerah.

BerAKHLAK  
SIGAP PSU  
DPAK SUKOHARJO

Daniel Setyo

b) Pelayanan lainnya



